

**PENEGASAN BATAS DESA BERPOTENSI KONFLIK MENGGUNAKAN METODE
KARTOMETRIK
(STUDI KASUS DESA WANASARI KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN
PURWAKARTA)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Geografi pada
program studi Sains Informasi Geografi*



Disusun Oleh:

Yuriko Reina Gustiani

1909635

**PROGRAM STUDI SAINS INFORMASI GEOGRAFI
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2023

HAK CIPTA

**PENEGASAN BATAS DESA BERPOTENSI KONFLIK MENGGUNAKAN
METODE KARTOMETRIK
(STUDI KASUS DESA WANASARI KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN
PURWAKARTA)**

Oleh

YURIKO REINA GUSTIANI

NIM. 1909635

Sebuah skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Geografi (S.Geo) pada Program Studi Sains Informasi Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

© Yuriko Reina Gustiani 2023

Universitas Pendidikan Indonesia

Agustus 2023

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak ulang, difotokopi, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis

LEMBAR PENGESAHAN

YURIKO REINA GUSTIANI (1909635)

**PENEGASAN BATAS DESA BERPOTENSI KONFLIK DENGAN METODE
KARTOMETRIK (STUDI KASUS DESA WANASARI KECAMATAN
WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA)**

Disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

Pembimbing I



Dr. Nanin Triawati Sugito, S.T., M.T

NIP. 19830403 200801 2 013

Pembimbing II



Asri Ria Affriani, S.T., M.Eng.

NIP. 9201712 1992041 1 021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sains Informasi Geografi



Dr. Lili Somantri, S.Pd., M.Si.

NIP. 19790226 200501 1 008

ABSTRAK

Penegasan batas wilayah desa menjadi salah satu konsentrasi dalam pengelolaan wilayah di Indonesia. Munculnya konflik dalam pengembangan batas wilayah desa sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif dalam prospek pengembangan wilayah desa selanjutnya seperti menimbulkan hubungan yang buruk dengan desa yang bersebelahan dan konflik kepemilikan hak tanah. Ditinjau dari aspek spasial kewilayahan, masih banyak daerah yang belum mempunyai batas yang tegas dan mempunyai peta batas wilayah yang dibuat sesuai kaidah pemetaan termasuk Desa Wanasari sebagai salah satu desa di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dengan keseluruhan luas 365 ha. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penegasan batas wilayah dengan menggunakan metode kartometrik. Selain itu, salah satu fokus penelitian ini adalah menyelesaikan konflik batas wilayah Desa Wanasari. Salah satu metode yang dapat diadaptasi untuk melakukan penegasan batas desa adalah dengan metode kartometrik menggunakan citra satelit resolusi tinggi jenis *SPOT 7* dan survey dilapangan berbasis GPS. Data yang telah diolah menggunakan metode kartometrik dan setelah melalui proses adjudikasi kemudian dituangkan dalam bentuk peta. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yakni kesalahan letak garis batas desa tidak sepenuhnya akan menjadi faktor penyebab konflik dan sengketa lahan. Terdapat 1 desa yang menjadi penyebab konflik batas dan sengketa lahan. Perbedaan luas wilayah desa dari hasil garis batas sementara adalah seluas 308 Ha. Sedangkan luas wilayah hasil perbaikan dengan metode kartometrik bertambah sebesar 22 Ha menjadi 330 Ha. Maka setelah batas desa dipertegas maka jelaslah kepemilikan lahan dan sumberdaya di dalamnya. Penyelesaian konflik Desa Wanasari telah dilakukan dengan kegiatan perbaikan garis batas. Selanjutnya garis batas hasil identifikasi tersebut akan digunakan sebagai bahan dan data bagi kegiatan penegasan batas desa dengan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Batas wilayah, konflik lahan, metode kartometrik

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Definisi Operasional.....	12
1.6 Struktur Organisasi Skripsi.....	14
1.7 Penelitian Terdahulu.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Penegasan batas desa.....	29
2.2 Desa.....	36
2.3 Sistem Informasi Geografis (SIG).....	38
2.4 Konflik Wilayah.....	40
2.5 Metode Kartometrik.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44

3.1	Metode Penelitian	44
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.2.1	Lokasi Penelitian	44
3.2.2	Waktu Penelitian	46
3.3	Alat dan Bahan Penelitian	48
3.3.1	Alat	48
3.3.2	Bahan	48
3.4	Tahapan Penelitian	50
3.4.1	Pra penelitian	50
3.4.2	Pelaksanaan penelitian	51
3.4.3	Pasca penelitian	51
3.5	Variabel Penelitian	52
3.6	Teknik Pengumpulan Data	52
3.7	Teknis Analisis Data	53
3.8	Diagram Alur Penelitian	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
4.1.1	Kondisi Geografis	58
4.1.2	Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Wanasari	59
4.2	Hasil dan Pembahasan	59
4.2.1	Identifikasi faktor penyebab konflik pada batas Desa Wanasari	59
4.2.2	Penetaan dan Analisis penyelesaian potensi konflik wilayah Desa Wanasari	Error! Bookmark not defined.
4.2.3	Analisis hasil penetaan wilayah berpotensi konflik dengan menggunakan metode kartometrik	79
BAB V PENUTUP		87

5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran.....	88
	DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR PUSTAKA

- Adikresna, P. R., & Budisusanto, Y. (2014). Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus Daerah Kec. Gubeng Dan Kec. Tambaksari). *Geoid*, 9(2), 195–200.
- Ahmad, A. G. (2017). Peranan penginderaan jauh dalam menyokong kajian pemetaan batas wilayah darat (studi kasus: Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY). *Journal of Geography of Tropical Environments*, 1(1).
- Ahmad, A. G., & Zuharnen, Z. (2017). Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh dan Metode Kartometris untuk Analisis Perubahan Batas Desa Studi Kasus: Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(3).
- Akbar, S. (2019). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *JIAGANIS*, 3(1).
- Asadi, A. (2016). Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi dengan Pendekatan Geospasial. *Jurnal Borneo Administrator*, 12(2), 131–147.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal. *JASP*.
- Bashit, N., Prasetyo, Y., Firdaus, H. S., & Amarrohman, F. J. (2019). Penetapan batas desa secara kartometrik menggunakan citra quickbird. *Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 1(1).
- Chairuddin, Z., Putra, P., & Baja, S. (2021). POTENSI KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN PERSAWAHAN DI KABUPATEN GOWA PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL MAMMINASATA: Potential Conflicts of The Rice Field Land-Use in Gowa District on Mamminasata National Strategic Area. *Jurnal Ecosolum*, 10(1), 49–68.
- Hamid, A. A. (2011). Otonomi daerah dan kualitas pelayanan publik. *Academica*, 3(1).
- Hasudungan, T. M. (2012). Evaluasi Kebijakan Penetapan Batas Desa. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(01).
- Matheus, I. R. (2022). *ANALISIS POTENSI WILAYAH PEDESAAN: Pendekatan Efektif dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Penerbit Andi.
- Mou, J. (2015). *Konflik Wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat*. Sam Ratulangi University.
- Mukaddas, J. (2022). ANALISIS PENENTUAN TITIK KARTOMETRIK ANTAR BATAS WILAYAH KECAMATAN KONAWE DAN KECAMATAN UEPAI KABUPATEN KONAWE. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 805–812.

- Muliyanto, E. (2016). Kajian Teknis Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Studi Kasus: Kelurahan Tabalong, Kabupaten Tabalong. *Skripsi. Institut Teknologi Nasional Malang. Malang.*
- Mulyono, B., Ikhwan, M., & Sadjati, E. (2015). PEMETAAN AREAL POTENSI KONFLIK IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK HT) BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) PADA PT. RAPP ESTATE MANDAU. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan, 10(1), 3.*
- Muspawi, M. (2014). *Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi)* (Vol. 16). Jambi University.
- Mustofa, R., & Bakce, R. (2019). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security, 1, 58–66.*
- Palmolina, M., & Fauziah, E. (n.d.). *PEMETAAN KONFLIK TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI DI DESA CISANTANA, CIGUGUR, KUNINGAN, JAWA BARAT CONFLICT MAPPING OF GUNUNG CIREMAI NATIONAL PARK IN CISANTANA VILLAGE, CIGUGUR, KUNINGAN, WEST JAVA.*
- PERATURAN-BIG-15-2019.* (n.d.).
- Pinori, J. J. (2014). DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP KONFLIK BATAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA. *LEX ADMINISTRATUM, 2(2).*
- Prahasta, E. (2001). Konsep-konsep dasar sistem informasi geografis. *Bandung: Informatika.*
- Putra, I. W. K. E., Diatmika, I. P. G., & Dewi, P. E. D. M. (2017). *Pemetaan Partisipatif Berbasis GPS (Global Positioning System) Untuk Penegasan Batas Wilayah Desa Pasca Pemekaran.*
- Riyadi, S. (2009). Analisis pemekaran wilayah dan potensi konflik di Kabupaten Donggala. *Academica, 1(2).*
- RUSDIYANTO, R. (2017). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Fasilitas Umum di Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau. *JUTIM (Jurnal Teknik Informatika Musirawas), 2(2), 99–105.*
- scholar.* (n.d.).
- Soeroso, F. L. (2012). Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Ke Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 9(3), 431–448.*
- Sulistiyono, D., Nuryadin, D., & Hadi, A. S. (2014). Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur). *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 6(1), 53–64.*
- Susilawati, H. (2010). Peranan manajemen Konflik Pada suatu Organisasi. *Media Wisata, 4(1).*

UU Nomor 22 Tahun 2012. (n.d.).

Click or tap here to enter text.